



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**RATU MIRANDA****NIM. 11724202935****PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sore Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah”*** yang ditulis oleh:

Nama : Ratu Miranda

Nim : 11724202935

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2021

Pembimbing Skripsi

**Dr. Abu Samah, MH.**

**NIP. 130217086**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 37 TAHUN 2002 DALAM UPAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH SERUMPUN BERDASARKAN FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **RATU MIRANDA**  
 NIM : **11724202935**  
 Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 25 Maret 2021**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2021


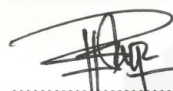


**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

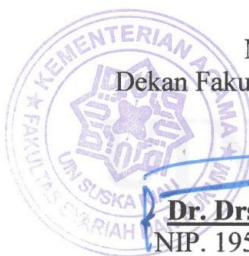
Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Rozi Andrini, ME.Sy**


Penguji I  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

  
 .....  
  
 .....  
  
 .....  
  
 .....



Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 1986031 005



## ABSTRAK

**Ratu Miranda (2021): “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah”**

Peraturan Daerah adalah produk hukum tingkat daerah yang dibentuk untuk mengatur daerah agar berjalan dengan tertib dan tentram. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang, apa saja faktor tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002, dan tinjauan *fiqih siyasah* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2002.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 76 orang terdiri dari Pemerintah Kecamatan Tualang, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang, Korwil Pasar, dan pedagang kaki lima Pasar Buah Serumpun. Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian terdiri dari 2 orang pihak pemerintah kecamatan, 5 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, 3 orang pihak Korwil Pasar, dan 10 orang pedagang kaki lima Pasar Buah Serumpun. Data diambil dengan tahapan observasi dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket dengan teknik *Stratified Random Sampling*.

Hasil penelitian : dari pihak pemerintah daerah Kecamatan Tualang dan Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat hingga saat ini, masih banyak PKL yang belum tertata dengan baik di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang. Hambatan yang menyebabkan tidak terlaksananya Peraturan Daerah ketertiban umum dengan optimal ialah dari faktor internal berupa kurangnya personil dari pihak Satpol PP, sarana prasarana penunjang dalam penertiban, dan armada Satpol PP yang kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta faktor eksternal berupa kurangnya tingkat kesadaran masyarakat khususnya PKL terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. Menurut tinjauan *fiqih siyasah* pelaksanaan Peraturan Daerah dalam upaya penertiban PKL sudah berjalan sesuai dengan aturan islam dan prinsip siyasah yakni prinsip keadilan, musyawarah, dan Perdamaian, dapat dilihat dari segi tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan Satpol PP dalam penertiban yang dilakukan dengan mengedepankan sistem preventif dan persuasif dari hati-kehati serta himbauan untuk menghindari kemudharatan yang terjadi seperti bentrokan antara PKL dan pihak terkait.

**Kata Kunci: Peraturan Daerah**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufik-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran jujungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliaulah Islam dapat tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu upaya untuk meningkatkan suatu peranan pemerintah, terkhususnya dibidang penegakan Peraturan Daerah ketertiban umum. Penelitian model ini mungkin sudah sering dijumpai pada model-modelan penelitian terdahulu, namun jarang terpublikasi dan diambil sebagai acuan untuk tindakan selanjutnya, serta tak disandingkan dengan kajian keislaman yakni *siyasah dusturiyyah*.

Untuk itulah melalui penelitian ini penulis mencoba menggabungkan yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk tindak lanjut dalam pembenahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2007 dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah”**. Dalam penulisan ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Terakhir, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi semua pihak yang membutuhkan, terkhususnya pemerintah Kecamatan tualang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang.

Pekanbaru, 21 April 2021  
Penulis

**Ratu Miranda**  
**NIM.11724202935**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta H. Marzuki SKM,MKL (ayah) dan Ida Royani (Ibu), abang kandungku Muhammad Fajri Sumar, S.Ked, kakak kandungku dr. Intan Komala Sari, dan adik kandungku Muhammad Aulia Azmi.
2. Bapak Prof. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sejumlah jajaran Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag, dan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Bapak Dr. H. Abu Samah, MH selaku pembimbing Skripsi.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademis sekaligus pembimbing skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya, dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya.
8. Semua pihak yang berkerja sama di Kecamatan Tualang, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 lokal C.

10. Teman-teman yang membantu, Sovia Rahmadanis, Siti Hawa, Noor Fadhila, M.Tegar, Widiya Dwiguna, Nisrina Yulianda, dan Fitria Rusmayanti.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan berupa pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Amin ya robbal'alam.*

Pekanbaru, 21 April 2021  
Penulis

**Ratu Miranda**  
**NIM.11724202935**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Pasar Buah Serumpun .....	15
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.....	16
1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.....	16
2. Tugas,Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.....	19
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang .....	20
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Negara Hukum.....	23
B. Otonomi Daerah.....	26
C. Peraturan Daerah.....	28
D. Satuan Polisi Pamong Praja .....	29
E. Fiqih Siyasah.....	36
1. Pengertian .....	36
2. Ruang Lingkup .....	36
3. Ketatanegaraan Dalam Islam .....	39

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Prinsip-Prinsip Bernegara .....	39
b. Hak Dan Kewajiban Penguasa.....	44
4. Siyasah Dusturiyyah .....	44
a. Persoalan Imamah.....	45
b. Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dengan Rakyat	47
c. Persoalan Wilayahul Al-Hisbah .....	49

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah .....	51
1. Tindakan Preventif.....	59
2. Tindakan Persuasif.....	63
3. Tindakan Represif.....	65
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 .....	67
C. Tinjauan <i>fiqih siyasah</i> dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum .....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.....	17
--	----



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara di Asia Tenggara yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan ibukota negara di Jakarta. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar nomor 4 (empat) di dunia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang diwakili oleh lima pulau besar, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan. Negara Kesatuan ialah bentuk negara yang kekuasaan tertinggi berada di Pemerintah Pusat. Negara Kesatuan memisahkan kekuasaan antara pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan dari negara sebagaimana diatur dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Berkaitan dengan ciri-ciri Negara Kesatuan, Soehino menambahkan bahwa Negara Kesatuan jika ditinjau dari susunannya, tidak tersusun ke dalam beberapa negara sebagaimana yang terdapat di dalam negara federasi, Negara

---

<sup>1</sup> Ahmad Sukardja, *"Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.120



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kesatuan bersifat tunggal, yakni hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara.<sup>2</sup>

Wilayah Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dimana tiap provinsi akan dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota yang mendapat hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Daerahnya sendiri, hal ini tertuangkan didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Desentralisasi menurut Joeniarto adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintahan lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>3</sup> Berdasarkan asas desentralisasi, Negara Indonesia dalam hal Pemerintahan Pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di Negara Indonesia, yang terletak ditengah Pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang gubernur, dan berpusat pemerintahan di Kota Pekanbaru. Kemudian Provinsi Riau terbagi lagi menjadi beberapa kabupaten/kota untuk menjalankan administrasi pemerintahan.

Kecamatan Tualang, merupakan pemekaran dari Kecamatan Kabupaten Siak dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Siak, dipimpin oleh seorang camat sebagai kepala pemerintahan. Kecamatan Tualang terdiri dari 8 (delapan) Kampung, dan 1 (satu) Kelurahan.

<sup>2</sup> Ibid, hlm.114

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia-Ed.Revisi-6", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan yang tinggi pula. Salah satu lapangan pekerjaan yang banyak dirumpuni adalah pekerjaan dalam sektor Peraturan Daerahgangan. Berdagang adalah salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tukar menukar barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Tempat Peraturan Daerahgangan menjadi pusat keramaian yang mendatangkan beberapa permasalahan dan keluhan dari masyarakat adalah sebuah pasar tradisional.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu upaya dalam peningkatan perekonomian daerah Kecamatan Tualang. Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang merupakan pasar tradisional yang berlokasi di Jalan Raya Km.4 Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pasar menjadi target sasaran dalam mencari kebutuhan sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Seperti pada umumnya pasar tradisional hampir memiliki para pedagang yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dan tidak menghiraukan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang menyebabkan permasalahan yang merugikan pemerintah, dan meresahkan masyarakat lainnya. Saat ini Pasar Buah Serumpun semakin padat oleh pedagang yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan area pasar tidak dapat menampung para pedagang. Lahirlah para pedagang kaki lima yang berjualan dengan menempatkan dagangannya ditempat-tempat umum.

Lokasi yang ditempati yang merupakan *public space* cenderung mengganggu ketertiban umum, bahkan mengganggu kelancaran arus lalu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lintas hingga mengurangi keindahan suatu daerah. Para pengguna jalan, khususnya pejalan kaki ketika melewati pasar harus terpaksa berjalan ke arah tengah jalan raya yang jelas membahayakan keselamatan jiwanya sendiri dan pengguna yang lain. Gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas semakin bertambah ketika pengendara/pengemudi melakukan pembelian sesuatu barang yang di jajakan oleh pedagang kaki lima, keadaan seperti ini jelas terlihat disepanjang jalan Pasar Tuah Serumpun Km.4 Kecamatan Tualang.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.<sup>4</sup> Lokasi pedagang kaki lima biasa berjualan akan menyebabkan lalu lintas yang terganggu, lingkungan menjadi jelek, semrawut dan kotor. Kehadiran pedagang kaki lima menimbulkan persoalan baik dalam persoalan ketertiban dan ketentraman umum, keamanan, maupun kebersihan.

Ketentraman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai keadaan tentram dan keadaan ketenangan baik hati maupun pikiran.<sup>5</sup> Dalam mengatasi persoalan daerah, setiap pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah memiliki hak dan wewenang dalam membentuk dan menegakkan suatu aturan yang diperlukan dalam keberlangsungan daerahnya.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melalui <https://kbbi.web.id/tenteram> ,pada tanggal 07 Maret 2021,pukul 21:23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah merupakan wujud pemberian kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>6</sup> Sebagai wujud pengaturan terhadap daerah, hampir setiap kota/kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah dalam mengatur masalah daerahnya, salah satunya ialah mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan.<sup>7</sup>

Di Kabupaten Siak khususnya dalam penanganan permasalahan mengenai ketertiban umum tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Peraturan ini bertujuan agar daerah-daerah yang ada di Kabupaten Siak dapat tertata dan berjalan dengan tertib dan tentram.

Kepala daerah Kecamatan Tualang bertugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2002 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2002 mengenai ketertiban umum, kepala daerah Kecamatan Tualang dibantu dalam oleh aparat khusus yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang yang merupakan unit pelaksana dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak

<sup>6</sup> Eka N.A.M. Sihombing, "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No.3, 2016, hlm.286

<sup>7</sup> Maris G.Rukmana, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di kota Semarang", Jurnal Konstituen, Vol.1 No.2, 2019, hlm.67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Nomor 15 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, dijelaskan dalam pasal 16 larangan untuk menempatkan barang atau benda di tepi/pinggir jalan umum, dan tempat-tempat umum lainnya untuk tujuan berdagang/usaha.<sup>8</sup>

Penelitian ini didasarkan prespektif *fiqih siyasah*, karena *fiqih siyasah* merupakan suatu aspek yang menjabarkan tentang hukum islam, yang mengatur kemaslahatan umat yang berbentuk pengaturan, dan segala bentuk hukum, yang dibuat oleh seorang pemimpin sesuai dengan ajaran syariat. Dalam konsep *fiqih siyasah* dikenal dengan *siyasah dusturiyah* (Politik Perundang-undangan) membahas mengenai hubungan pemerintah dengan masyarakat serta kelembagaan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

*Ulil amri* akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (*authority dan power*), berjalan berdasarkan pada kewenangan, dan kekuasaan.<sup>9</sup> *Ulil amri* dapat dikaitkan dengan kepala daerah yang berperan dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat mengeluarkan peraturan baru yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):59 yang berbunyi :

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 16

<sup>9</sup> Toto Tohir, "*Ulil Amri dan Ketaatan KepadaNya*", Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.18 No.3, 2002, hlm.272

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasulnya (as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>10</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwasannya kita wajib untuk mentaati *ulil amri* (pemimpin) serta kebijakannya yang berlandaskan kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Maka dari itu apa yang telah ditetapkan oleh *ulil amri* harus kita hormati dan patuhi demi terciptanya kemaslahatan. *Ulil amri* juga harus dapat dipercaya dan tidak menyalahi perintah Allah SWT.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam *fiqh siyasah* dikenal dengan sebuah lembaga pengawas yang menindak para pelanggar peraturan yang dikenal dengan istilah *wilayatul al-hisbah*. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas sama dengan prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan dalam *fiqh siyasah* yaitu prinsip Perdamaian dan keadilan.

Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti, bahwasannya Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 pasal 16 belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan pedagang kaki lima yang masih berdagang difasilitas umum

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm.87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu jalan raya dan trotoar yang menyebabkan daerah jalan yang padat dan tidak nyaman untuk dilalui, terganggunya ketertiban umum dengan ditandai dengan arus lalu lintas yang terganggu.

Dalam konteks negara hukum, salah satunya adalah tegaknya suatu aturan tergantung pada penegak peraturan tersebut dan masyarakat. Kurangnya peran pihak pemerintah Kecamatan Tualang terkhusus Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang dalam menegakan Peraturan Daerah ketertiban umum di Kecamatan Tualang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum, menyebabkan para PKL masih melakukan pelanggaran dengan menjajakan dagangannya disepanjang jalan raya dan trotoar.

Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tuah Serumpun, agar terciptanya daerah yang tertib dan tentram, untuk itulah penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyash”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37 Tahun 2002 dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002?
3. Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002.
3. Untuk mengetahui tinjauan *fiqih siyasah* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang.



## E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan SI pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini berguna sebagai sumber informasi bagi para akademis maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan;
3. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat dan peneliti terhadap peran pemerintah daerah, terkhususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan prosedur langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Metode penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah manusia dan sosia.<sup>11</sup> Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Tualang dan Satpol PP Kecamatan Tualang. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Bambang Suggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang berdasarkan perspektif *fiqih siyasah*.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 76 orang terdiri dari Pemerintah Daerah Kecamatan Tualang yang terdiri dari 26 orang, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang yang terdiri dari 11 orang, Korwil Pasar Kecamatan Tualang yang terdiri dari 9 orang, dan PKL Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang yang terdiri dari 30 orang.

Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian berjumlah 20 orang yang terdiri dari 2 orang pihak Pemda Kecamatan Tualang, 5 anggota Satpol PP Kecamatan Tualang, 3 orang pihak Korwil Pasar, dan 10 orang PKL pasar Tuah Serumpun.

Teknik sampel dalam penelitian ini adalah *Stratified Random Sampling*, dimana populasi dibagi menjadi kelompok lebih kecil yang disebut dengan strata.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.<sup>12</sup> Data Primer penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden yang terdiri dari Pemerintah Kecamatan Tualang, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang, Korwil

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.175

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar, dan penyebaran angket yang terdiri dari responden PKL Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data serta informasi dengan bantuan buku-buku.<sup>13</sup> Data sekunder penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.<sup>14</sup> Data tersier dalam penelitian ini berupa internet.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi, yakni mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang.
- b. Wawancara, yakni teknik pada saat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap responden yang terdiri dari Pemerintah Kecamatan Tualang yang berjumlah 2 orang, Satpol PP Kecamatan Tualang yang berjumlah 5 orang, dan Korwil Pasar Kecamatan Tualang yang berjumlah 3 orang;

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.106

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Angket, yakni pengumpulan data dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini penyebaran angket dilakukan terhadap responden yaitu pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang yang berjumlah 10 orang;
- d. Dokumentasi, yakni digunakan untuk menggambarkan lapangan yang membantu peneliti untuk menjelaskan serta sebagai bahan pelengkap pada penelitian ini.

#### 6. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni uraian penulisan yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dilapangan penelitian, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

#### G. Sistematika Penulisan

Bab 1 merupakan pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan gambaran umum lokasi penelitian, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu gamabran umum dari Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III merupakan tinjauan teoritis, dalam bab ini berisi tentang landasan teori Negara Hukum, Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan *fiqih siyasah*.

Bab IV merupakan hasil penelitian, dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan meliputi bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang, apa saja faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 tahun 2002, dan bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 tahun 2002.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta mengemukakan saran dari penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Pasar Buah Serumpun<sup>15</sup>

Pasar Buah Serumpun diberi nama oleh pemuka masyarakat dengan nama Pasar Buah Serumpun pada tahun 1988. Didirikan oleh masyarakat dengan dana swadaya. Pasar Buah Serumpun merupakan salah satu pasar yang sudah dikenal sejak lama, yang merupakan pasar tradisional yang tidak lebih dari pasar tempel rakyat yang ada pada masa sekarang ini.

Kondisi Pasar Buah Serumpun yang semakin padat oleh pedagang sebagai aktivitas disektor Peraturan Daerahgangan yang menyebabkan areal pasar ini tidak lagi mampu menampung perdagangan. Tahun 2002 pasar ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Peraturan Daerahgangan Kabupaten Siak sampai tahun 2011.

Pada Januari 2012 dari Dinas Perindustrian dan Peraturan Daerahgangan diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak. Kemudian didaftarkan pada Peraturan Daerah yang dikelurakan oleh Bupati Kabupaten Siak, maka dibentuklah UPTD Pasar Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Siak, dan mengirim unit Koordinator Wilayah (Korwil) disetiap kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tualang untuk mengelolah Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang dan pasar lainnya yang ada di Kecamatan Tualang.

---

<sup>15</sup> Arsip Korwil Pasar kecamatan tualang

## B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 Tentang Pemerintah Daerah. Tugas Satpol PP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

### 1. Visi Misi Satpol PP Kabupaten Siak

a. Visi : *“Terdepan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.”*

#### b. Misi

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggara ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- 2) Menciptakan suasana aman dan tentram menuju terwujudnya ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- 4) Dalam menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya Satuan Polisi Pamong Praja menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terikat lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.1**  
**Jumlah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Siak**

No	Lokasi Satpol PP	Polisi Pamong Praja					Jumlah
		Gol.I V	Gol.II I	Gol.II	Gol. 1	TKK	
1	Kabupaten Siak	6	16	71	2	97	192
2	Kecamatan Mempura	-	-	2	-	2	2
3	Kecamatan Dayun	-	-	5	-	-	5
4	Kecamatan Bunga Raya	-	-	2	-	2	4
5	Kecamatan Sabak Auh	-	-	1	-	2	3
6	Kecamatan Pusako	-	-	1	-	3	4
7	Kecamatan Sungai Apit	-	1	5	-	5	11
8	Kecamatan Koto Gasib	-	-	5	-	-	5
9	Kecamatan Lubuk Dalam	-	1	3	-	-	4
10	Kecamatan Kerinci Kanan	-	-	5	-	-	5
11	Kecamatan Tualang	-	1	9	1	-	11
12	Kecamatan Minas	-	3	4	-	-	17
13	Kecamatan Sungai Mandau	-	-	3	-	-	3
14	Kecamatan Kandis	-	3	7	1	2	13
15	Honor Kantor	-	-	-	-	17	17
16	Cleaning Service Kantor	-	-	-	-	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>25</b>	<b>123</b>	<b>4</b>	<b>135</b>	<b>292</b>

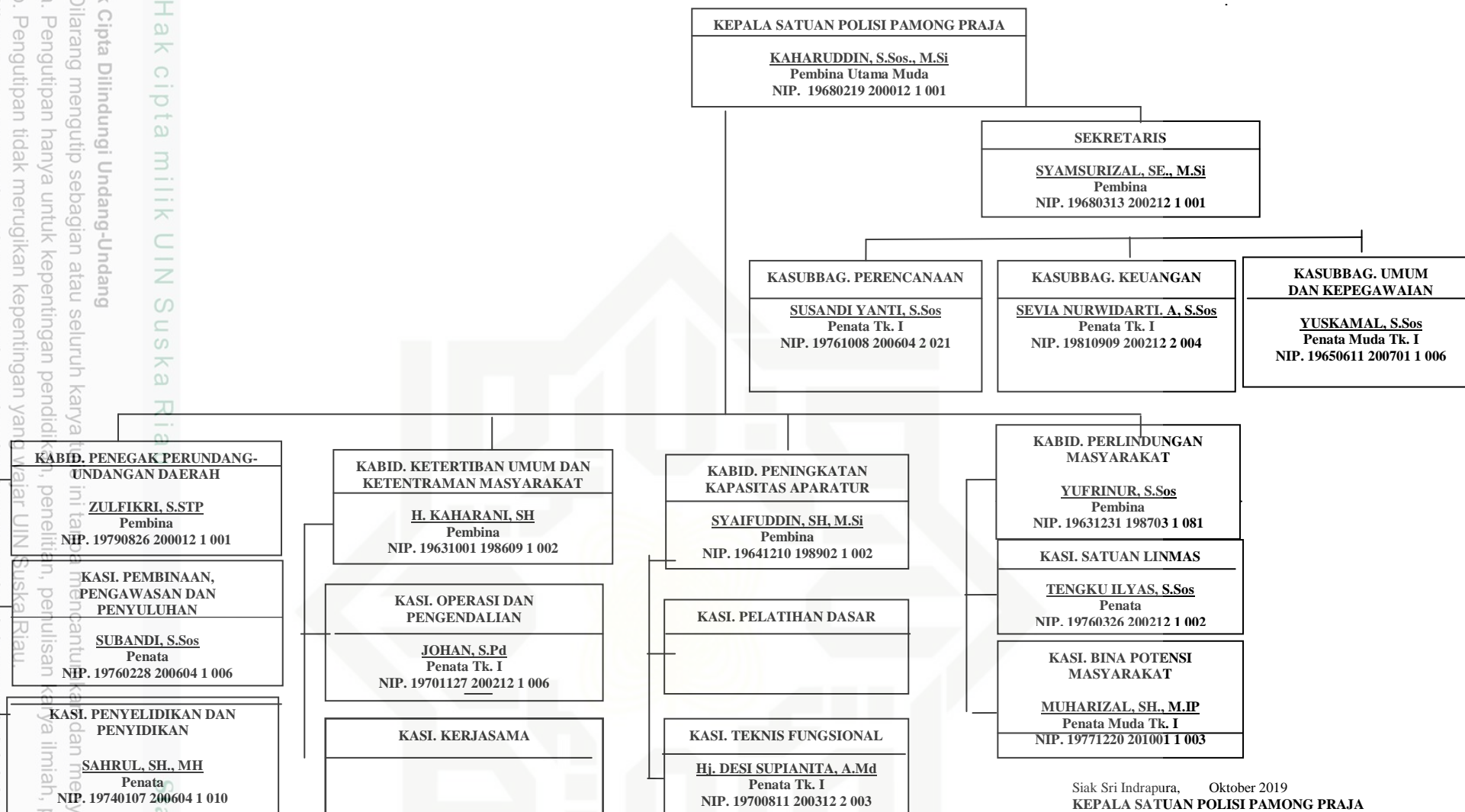
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Siak



## STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK

**PETA JABATAN UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SIAK**

Dengan Rincian



Siak Sri Indrapura, Oktober 2019  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN SIAK**

**dto**

**KAHARUDDIN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 menjabarkan tugas pokok dari Satpol PP yakni menegakkan Peraturan Daerah, dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta dan perlindungan masyarakat.<sup>16</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas memiliki Fungsi :<sup>17</sup>

- a. Penyusunan program dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentaman serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksana kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentaman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksana kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksana koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, Pasal 21 ayat (1)

<sup>17</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengawas terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menatati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP juga memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
  - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
  - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
3. Satpol PP Kecamatan Tualang

Peraturan Daerah adalah wujud dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagaimana peraturan yang menangani permasalahan ketertiban umum

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertuang di dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 37 tahun 2002. Penegakan dan pelaksanaan Perda mengenai ketertiban umum di daerah kecamatan di laksanakan oleh aparat khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Satpol PP Kecamatan Tualang merupakan unit pelaksana di daerah Kecamatan Tualang yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah kordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang diatur dala Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten siak.Satpol PP Kecamatan Tualang berfungsi adalah membantu kepala daerah yang dalam hal ini adalah Camat Tualang dalam penegakan Peraturan Daerah dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kecamatan Tualang.

Dalam menjalankan tugas dan peranannya, Satpol PP Kecamatan Tualang tetap berlandaskan peraturan yang berlaku di Kabupaten Siak.

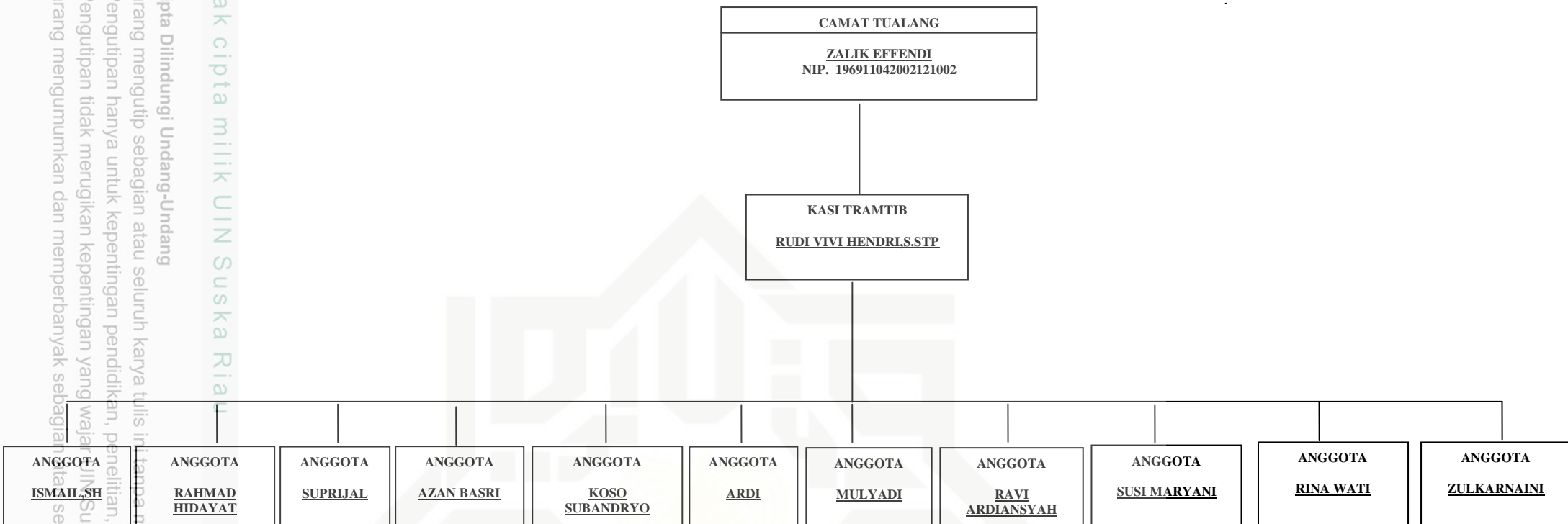
Susunan organisasi Satpol PP Kecamatan Tualang dipimpin oleh Kepala Satuan yang dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Tualang yang secara teknis bertanggung jawab kepada Camat Tualang dan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau pengolahan informasi.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRUKTUR TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KECAMATAN TUALANG**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Negara Hukum

Suatu negara memiliki suatu tujuan, salah satunya adalah kesejahteraan rakyatnya. Terciptanya kesejahteraan rakyat merupakan bentuk dari terjaminnya keadilan yang dapat berdiri tegak dengan adanya sebuah aturan yang melindungi kebebasan setiap warga negara, dan membatasi kekuasaan pemerintahan.

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.<sup>19</sup>

Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Hugo De Grotius mendefinisikan hukum sebagai aturan tindakan moral yang membawa kepada kebenaran.<sup>20</sup>

Aristoteles mendefinisikan negara sebagai kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik.<sup>21</sup>

Logemen juga mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi

<sup>19</sup> Ratna Artha Windari, *"Pengantar Hukum Indonesi-Ed.1,Cet.2"*, (Depok:Rajawali Pers,2018), hlm.1-2

<sup>20</sup> Abdul Hamid, *"Teori Negara Hukum Modern"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm.13-15

<sup>21</sup> Raimundus Bulet Namang, *"Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles"*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.4 No. 2, 2020, hlm.250

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu.<sup>22</sup>

Suatu negara hukum akan menunjukkan kepada bentuk tidak ada satupun yang berada di atas hukum, dan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum. Negara dan lembaga lainnya dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum, dan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum demi tercapainya keadilan. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas.

Prinsip negara hukum menurut Prof. Padmi Wahjono, adalah suatu sistem tertib hukum yang merupakan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dan dilengkapi dengan pelaksanaan kepentingan umum. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat diartikan sebagai tujuan daripada negara hukum.<sup>23</sup>

Secara historis, konsep dari negara hukum muncul dalam berbagai model dan bentuk. Seperti sistem negara hukum yang dianut oleh islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Negara hukum menurut konsep *Eropa Kontinental* dinamakan *Rechtstaat*. Negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon* dinamakan *Rule Of Law*. Negara Indonesia sejak kemerdekaan telah mengakui sebagai negara hukum hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1

<sup>22</sup> Usman, "Negara dan Fungsinya (Tela'ah atas Pemikiran Politik)", Jurnal Al-Daulah, Vol.4 No.1, 2015), hlm.132-133

<sup>23</sup> Zairin Harahap, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara-Ed.Revisi, Cet.11", (Depok: Rajawali Pers,2019), hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

ayat (3) yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Seluruh prinsip dan sistem hukum Indonesia harus dapat dilengkapi dengan perangkat hukum yang baik, aparaturnya yang tegas, sehingga Indonesia akan tumbuh dan berkembang menjadi negara yang sejahtera.

Filsuf J.J. Rousseau, pencetus teori *The Social Contract*, mengartikan pemerintah sebagai suatu badan penengah yang didirikan antara rakyat sebagai subjek dan penguasa, untuk saling menyesuaikan, ditugaskan melaksanakan hukum dan memelihara dengan baik kemerdekaan sipil dan politik. Sedangkan Max Weber mengartikan pemerintah sebagai apapun yang berhasil menompang klaim bahwa ialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuasaan fisik untuk melaksanakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu.<sup>24</sup>

Peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia secara signifikan selama sejarah umat manusia. Peran pemerintah dalam menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin kehidupan sosial. Sebagaimana masyarakat kita menjadi lebih kompleks, pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan lebih mendominasi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Nyoman Sumaryadi, "Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia", (Bogor: Graha Indonesia, 2013), hlm. 19-20

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 21



## B. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menjelaskan Negara Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, yang tiap provinsi terbagi menjadi beberapa kabupaten/kota yang memiliki Pemerintahan Daerah bentuk dari prinsip desentralisasi yang berfungsi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Konsep desentralisasi bertujuan agar pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara keseluruhan dari keberagaman masing-masing daerah yang ada di Indonesia.

Achmad Ruslan mengemukakan bahwa Negara Indonesia dilihat dari struktur/susunannya merupakan Negara Kesatuan yang bersifat desentralisasi, yang berarti bahwa kekuasaan pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada daerah untuk selanjutnya daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan kepentingan masyarakatnya.<sup>26</sup>

Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.<sup>27</sup> Dengan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia, pemerintahan yang dilakukan secara sentralisasi kurang berjalan dengan baik, karena daerah-daerah akan cenderung sulit menerima fungsi dari pemerintahan. Dengan kemajemukan tersebut pembagian wewenang yang diberikan pusat kepada Pemerintahan Daerah atau desentralisasi sudah dianggap jalan yang baik. Pemerintahan yang lebih spesifik akan mengatur dan memenuhi kebutuhan tiap daerahnya dengan baik.

<sup>26</sup> Dayanto, Asma Karim, "Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode, dan Teknik Pembentukan-Ed.Revisi, Cet. 1", (Malang: Setara Pers, 2019), hlm.86-87

<sup>27</sup> Nyoman Sumaryadi, *Ibid*, hlm.16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Rondinelli, desentralisasi merupakan peralihan kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan dan administrasi dari pemerintah pusat ke organisasi lapangan, satuan administrasi daerah, Pemerintah Daerah atau lembaga-lembaga masyarakat. Menurut RDH.Koesumahatmaja, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah-daerah.<sup>28</sup>

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana kekuasaan pemerintahannya terpusat. Tetapi juga memiliki Pemerintahan Daerah yang diberi kewenangan mengurus pemerintahannya sendiri. Karna urusan pemerintahan yang ada di daerah akan tersalurkan dengan baik hingga pemerintahan pusat dengan bantuan pemerintahan daerah, agar seluruh masyarakat tertata dengan baik.

Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang sangat signifikan dalam struktur kenegaraan.<sup>29</sup>

Desentralisasi akan diwujudkan dalam bentuk Otonomi Daerah. Desentralisasi berbeda dengan otonomi, dimana desentralisasi ini merupakan suatu proses dari pembagian wewenang ke daerah, sedangkan otonomi adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah dalam mengatur rumah tangganya.

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

---

<sup>28</sup> Dayanto, *Ibid*, hlm.88

<sup>29</sup> Ahmad Sukardja, *Ibid*, hlm.126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Perlunya wewenang dalam mengatur secara sah akan memudahkan direalisasikan kepada masyarakat. kemajemukan Negara Indonesia memerlukan konsep desentralisasi, dan desentralisasi kewenangan tersebut akan melahirkan otonomi daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, bukan mengatur urusan pemerintahan pusat. Otonomi daerah dapat berpotensi dalam membangun perekonomian dan pembangunan yang ada di daerah.

### C. Peraturan Daerah

Negara Kesatuan adalah negara yang kekuasaannya terbagi ke daerah melalui otonomi dengan pemberian wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, setiap pemerintah daerah diberi kewenangan dalam membuat dan menegakkan suatu peraturan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan yang berlaku akan menciptakan tatanan daerah yang baik demi terciptanya pemerintahan yang baik.

Peraturan adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi satu dalam bidang legislatif yang dilakukan oleh badan legislatif dan badan pemerintah berdasarkan wewenang.<sup>31</sup> Pemerintah daerah berwenang dalam membuat peraturan dan juga bertanggung jawab dalam penegakkan peraturan tersebut agar dapat berjalan dengan semestinya. Peran pemerintah sangat dibutuhkan

<sup>30</sup> Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia", Jurnal Criksetra, Vol.5, No.9, 2016, hlm.79

<sup>31</sup> Abdul Latif, Hasbi Ali, "Politik Hukum", (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam penegakan keteraturan dan ketertiban suatu roda pemerintahan daerah demi terciptanya kondisi daerah yang baik.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>32</sup> Dalam mengurus urusan Pemerintahan Daerah diberlakukannya Peraturan Daerah yang merupakan wujud pemberian kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah merupakan hasil kerja antara gubernur/bupati/walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### D. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu perangkat daerah yang berfungsi dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Satpol PP akan bersangkutan dengan salah satunya pelaku usaha yang melakukan kegiatan perekonomian tidak pada tempatnya atau disebut dengan pedagang kaki lima (PKL). Adanya PKL merupakan persoalan dalam masalah ketertiban umum seperti lalu lintas, keamanan, ataupun dalam hal lingkungan bersih.

Secara umum pedagang kaki lima (PKL) didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa, untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum terutama di pinggir jalan dan trotoar.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (2)

<sup>33</sup> Maris, *Ibid*, hlm. 74



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang merugikan masyarakat dan juga Pemerintah Daerah, seperti keresahan masyarakat mengenai ketertiban daerah karena kemacetan adanya keberadaan PKL yang mengganggu kegiatan masyarakat. Oleh karena itu Peran Satpol PP sangatlah dibutuhkan dalam menangani permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* yang berarti pengasuh, yang berasal dari kata *Among* yang juga memiliki arti sendiri, yaitu mengasuh, dan Praja adalah pegawai negeri atau pegawai pemerintahan. Jadi Satpol PP adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.<sup>34</sup>

Dasar hukum pembentukan Satpol PP adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Sapol PP, dan Peraturan Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.

Satpol PP telah ada sejak zaman VOC, masa pemerintahan Gubernur jenderal Pieter Both di Batavia. Masa itu ketentraman dan ketertiban Batavia sangat dibutuhkan, untuk menjaga dan mencegah serangan masiv dari tentara Inggris dan penduduk lokal, maka dibentuklah *bailluw*, yaitu sejenis polisi yang merangkap tugas jaksa dan hakim yang membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara VOC dengan warga, dan untuk memelihara

<sup>34</sup> Muh.Hasrul, "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah", Amanna Gappa, Vol.25, No.2, 2017, hlm.62

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketertiban dan keamanan antara warga itu sendiri. Masa kepemimpinan Raffles, dikembangkanlah *bailluw* dengan bentuk satuan lainnya yang disebut *besturrs* atau Polisi Pamong Praja, yang bertugas membantu pemerintahan ditingkat kewedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman serta keamanan warga. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, polisi pamong praja tetap menjadi bagian organisasi dari kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.<sup>35</sup>

Satpol PP mengalami beberapa kali pergantian nama, namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari polisi pamong praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewon, yang kemudian berubah pada tanggal 10 November 1948 menjadi Datasemen Polisi Pamong Praja;
2. Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor UP.32/2/21, disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, diubah menjadi Pagar Baya;
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963, diubah menjadi Pagar Praja;

---

<sup>35</sup> Muh.Hasrul, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai prangkat daerah;
6. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggara ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, hingga sekarang Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>36</sup>

Polisi Pamong Praja adalah bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan peranan dalam menjalankan dan menegakkan Peraturan Daerah. Peran dan fungsi Satpol PP adalah kewajiban serta tanggung jawab dalam menertibkan Peraturan Daerah untuk mencapai keteraturan pelaksanaan otonomi daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, seta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

<sup>36</sup> Ibid, hlm.63

<sup>37</sup> Vinny Nottrela Ughude, "Tugas Dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam penegakan Hukum", Lex Et Societatis, Vol.3, No. 3, 2015, hlm160

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan sebagai berikut.<sup>38</sup>

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. Menindak warga negara, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah/atau Peraturan Kepala Daerah;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP, Pasal 2 ayat (1) untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan penyelenggara ketertiban umum, dan penyelenggara perlindungan masyarakat disetiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

Pasal 5 menegaskan tugas Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Pasal 6 menjelaskan fungsi Satpol PP adalah :

---

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lainnya berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pasal 28 menjelaskan bahwa pertanggung jawaban kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Secara struktural kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah.<sup>39</sup>

Satpol PP juga dioptimalkan kinerjanya di dalam Pemerintahan Daerah, salah satunya di Kabupaten Siak dengan dibentuknya Peraturan Daerah mengenai Fungsi dan tugas Satpol PP yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Vinny, *Ibid*, hlm155

<sup>40</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satpol PP dalam melaksanakan beberapa tugas dan fungsi dapat bekerja sama dengan instansi lain. Seperti instansi Kepolisian dalam menertibkan PKL yang menjajakan dagangannya menggunakan kendaraan bermotor yang melanggar Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang berlaku. Tertera dalam Pasal 8 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.

Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Satpol PP dapat melakukan penindakan preventif non-yustisial yaitu:<sup>41</sup>

1. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
2. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
  - a. Surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
  - b. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
  - c. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, maka akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Satpol PP disetiap daerah diharapkan mampu menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang berlaku dan menjaga ketentraman, ketertiban yang ada dimasyarakat agar dapat melaksanakan peranan dengan optimal serta membantu kepala daerah.

---

<sup>41</sup> Vinny, *Ibid*, hlm158-159

## E. Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian

Fiqih secara etimologi (bahasa), berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa *fiqih* berarti paham yang mendalam.<sup>42</sup> Siyasah secara berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan. Menurut Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya, bahkan Allah SWT tidak menentukannya.<sup>43</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>44</sup>

Jadi, *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara, demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

### 2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqih siyasah*. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena bersifat teknis. Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* ruang lingkup *fiqih siyasah* mencakup:<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Iqbal Muhammad, “*Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm.2

<sup>43</sup> Dzazuli, “*Fiqih Siyasah*”, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.26

<sup>44</sup> Iqbal, *Ibid*, hlm.4

<sup>45</sup> Iqbal, *Ibid*, hlm.14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan);
- b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter);
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan);
- d. *Siyasah Harbiyah* (hukum perang);
- e. *Siyasah Idariyah* (administrasi negara).

Adapun menurut Ibnu Taimiyah, meringkasnya mejadi empat bidang kajian, yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan);
- b. *Siyasah Idariyah* (Administrasi negara);
- c. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan moneter);
- d. *Siyaah Dauliyyah/kharijiyyah* (hubungan internasional).

Sementara Abdul al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu :

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan);
- b. *Siyaah Dauliyyah* (hubungan internasional);
- c. *Siyasah Maliyyah* (keuangan negara).

M.Hasbi Ash-Shiddieqy membagikan ruang lingkup *fiqih siyasah* menjadi delapan bidang:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan);
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum);

---

<sup>46</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan);
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter);
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara);
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional);
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan);
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian ruang lingkup *fiqih Siyasah* disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:<sup>47</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, bagian ini meliputi kajian tentang penetapan hukum (*tasyi'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif;
- b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut sebagai politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan kePeraturan Daerah antara warga negara yang muslim dengan yang non muslim yang berbeda kebangsaan. Dibagian ini ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 15-16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Siyasah Maliyyah, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, Peraturan Daerahgangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, dan perbankan.

Jadi dari penjelasan diatas diketahui bahwa skripsi ini berjudul pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah ini lebih tertuju kepada *siyasah dusturiyyah*, karena kajian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini berhubungan dengan penetapan dan pelaksanaan Perundang-undangan.

### 3. Ketatanegaraan dalam Islam

- a. Prinsip-prinsip bernegara<sup>48</sup>

#### 1) Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam surah An-Nisa:58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-

<sup>48</sup> Radiana, “Islam sebuah system kehidupan bernegara”, Jurnal Cosmogoy, Vol.1, No.1, 2015, hlm.191

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”(QS.An-Nisa[4]:58).*<sup>49</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan manusia wajib menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan manusia wajib menetapkan hukum dengan adil diantara manusia.

#### 2) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan suatu prinsip penting dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah memiliki sifat maha adil. Keadilannya penuh dengan kasih sayang kepada makhluknya. Dalam islam keadilan adalah kebenaran. Islam menghendaki supaya umatnya mewujudkan sistem pemerintahan yang adil. Karena dengan pemerintahan yang adil, maka akan terwujudlah keamanan, kedamaian, dan kemaslahatan masyarakat.

Dijelaskan tentang prinsip keadilan pada surah An-Nisa:135 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْدَا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm.87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (QS.An-Nisa[4]:135)<sup>50</sup>*

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman wajib menegakkan keadilan, setiap mukmin wajib menjadi saksi karna Allah dengan jujur dan adil, dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran.

### 3) Prinsip Musyawarah

Islam menegaskan bahwa wajib musyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Imran:159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُمْ خُذُّهُمْ فِي الْأَمْرِ  
لَا نَفْضُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ  
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karna itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm.100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tekad, maka bertawakallah kepa Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya”. (QS.Al-Imran[3]:159)*

Ayat di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat dan kepentingan umum, Nabi selalun mengambil keputusan dengan musyawarah. Musyawarah adalah suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan, saran yang diajukan dalam pemecahan masalah.

#### 4) Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam islam dapat dipahami dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui maha mengenal” (QS.Al-Hujarat[49]:13).<sup>51</sup>

Ayat ini menjelaskan bagaimana proses mengenai manusia, dimana Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan dari Adam dan hawa, lalu dianjurkan melakukan pernikahan dalam proses penciptaan yang seragam.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm.517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5) Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama Perdamaian, oleh karena itu Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan Perdamaian sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah:208 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam islam secara keseluruhan, dan janganlah mau ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." (QS.Al-Baqarah[2]:208).<sup>52</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa jika ingin mencari perdamaian, maka perdamaian ada di dalam islam, dan diperintahkan untuk menjauhi langkah-langkah setan

## 6) Prinsip Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh. Prinsip kesejahteraan dalam islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat.

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak dan kewajiban penguasa<sup>53</sup>

Seorang *ulil amri* atau kepala negara bertanggung jawab langsung kepada Allah, juga bertanggung kepada umat yang telah mendelegasikan kekhalifan kepada dirinya. Kepala negara atau *ulil amri* merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai kepala negara bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini ditujukan agar dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan syari'atnya serta membimbing jalan kemaslahatan.

Hak-hak penguasa menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak yakni hak untuk ditaati dan untuk dibantu. Hak-hak penguasa erat sekali dengan kewajiban rakyatnya untuk menaati dan membantu. Sedangkan kewajiban penguasa menurut Al-Mawardi adalah memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat, memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan.

4. Siyasah Dusturiyyah

Kebijakan pemerintahan dalam *fiqih Siyasah* dikenal dengan istilah *Siyasah Dusturiyyah* (Politik perundang-undangan). Permasalah di dalam *fiqih siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di

<sup>53</sup> Jaenuddin, "Hak dan kewajiban kepala negara menurut hukum islam", 'Adliyah, Vol.9, No.2, 2015

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>54</sup>

Tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan adalah kemaslahatan manusia dan untuk kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini membahas konsep-konsep konstitusi (UUD dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>55</sup>

#### a. Persoalan Imamah

Pada umumnya kata-kata imamah atau *ulil amri* menunjukan kepada bimbingan kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum. Tertuang didalam Al-Quran:<sup>56</sup>

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ  
أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

<sup>54</sup> Dzazuli, *Ibid*, hlm.47

<sup>55</sup> Iqbal, hlm 177

<sup>56</sup> Dzazuli, *Ibid*, hlm.54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas”. (QS.Yasin[36]:12)<sup>57</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “dan orang-orang yang berkata : “Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS.Al-Furqan[25]:74)<sup>58</sup>

Menurut ‘Audah, imamah adalah kepemimpinan umat-umat islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW., dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat islam.<sup>59</sup> Kewajiban imam menurut Al-Mawardi yakni memelihara agama, menegakkan hukum Allah, Memerangi orang-orang yang menentang Islam, mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang bersengketa.<sup>60</sup>

Dapat kita ketahui konsep imam sebagai pemimpin sangatlah diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Dengan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang diemban harus didasarkan pada kemaslahatan umat dan menurut prinsip-prinsip islam.

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm.440

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm.366

<sup>59</sup> Iqbal, *Ibid*, hlm.150

<sup>60</sup> Dzazuli, *Ibid*, hlm.61-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemimpin juga harus amanah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan dan pemutus persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Dikalangan jumhur ulama berpendapat bahwa islam mengharuskan adanya negara dan pemerintahan dengan alasan di dalam ajaran islam kita dapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggung jawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintah serta negara penting sekali di dalam rangka melaksanakan hukum-hukum islam.<sup>61</sup>

Dalam menjalankan suatu peraturan islam tidak akan lepas dengan konsep negara. Negara yang merupakan cikal bakal dari tujuan pemerintahan dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya harus dibentuk dengan sebaik-baiknya dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan dan mewujudkan keadilan sesuai dengan ajaran islam.

Oleh Karena itu, jumhur ulama mewajibkan adanya pemerintahan yang didasarkan pada Sunnah Nabi, Ijma' para sahabat, qiyas, dan fungsi melaksanakan tugas agama, mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat, dan mewujudkan keadilan yang sempurna.<sup>62</sup>

b. Hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat

Dalam sistem pemerintahan islam, *ulil amri* atau imam negara hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.83

<sup>62</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam karyanya *al-ahkam al-sulthaniyah*, al-Mawardi memaparkan sepuluh kewajiban kepala negara yang harus dijalankan, yakni:

- 1) Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama;
- 2) Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakat;
- 3) Menjaga keamanan dalam negeri;
- 4) Menegakan *hudud* (hukum pidana);
- 5) Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar;
- 6) Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam;
- 7) Mengelola keuangan negara;
- 8) Menentukan belanja negara;
- 9) Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan mereka memegang jabatan;
- 10) Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum.

Sebaliknya, jika kepala negara telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakk yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Menurut al-Mawardi, hak kepala negara atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu hak untuk ditaati, dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara menjalankan pemerintahan dengan baik.

c. Persoalan *wilayatul al-Hisbah*

Secara etimologi, *wilayatul al-hisbah* berasal dari kata *wilayat* yang berarti kekuasaan atau kewenangan, dan kata *al-hisbah* yang berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan penuh perhitungan.<sup>63</sup> Para ulama secara umum memberikan definisi *al-hisbah* sebagai mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari pada yang mungkar.<sup>64</sup>

Menurut al-Mawardi, *wilayatul al-hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf, ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang mungkar, ketika perkara ini mulai dikerjakan orang. Kajian mengenai *wilayatul al-Hisbah* biasanya dimasukkan kedalam bab *al-qadha'* (peradilan).<sup>65</sup> Tujuan *wilayatul al-hisbah* lebih mengarah kepada dua tujuan, yakni *hisbah* terhadap kegiatan ekonomi, dan *hisbah* terhadap pasar.<sup>66</sup>

Ibn Taimiyyah menerangkan bahwa prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-mungkar* dapat diterapkan melalui dua cara. Pertama

<sup>63</sup> Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan undang-undang Pemerintahan Aceh", Jurnal Legalite: Jurnal perundang-undangan dan hukum pidana islam, Vol.3, No.1, 2018, hlm.75

<sup>64</sup> Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum", Jurnal Syari'ah, Vol.9, No.1, 2017, hlm..27

<sup>65</sup> Mariadi, *Ibid*, hlm.76

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 83



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah penerapan secara umum yang dilakukan oleh semua individu baik dalam urusan agama, akhlak, maupun politik. Kedua adalah dengan penerapan secara khusus dengan memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai khusus dalam sebuah negara untuk menjalankan prinsip ini.<sup>67</sup>

Disamping *wilayatul al-hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan dalam rangka kemaslahatan. Ini merupakan bentuk dari peran lembaga khusus penegakan Peraturan Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu dan berkoordinasi dengan kepala pemerintahan.

---

<sup>67</sup> Samsul Bahri, *Ibid*, hlm.28

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang berdasarkan perspektif fiqih siyasah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dari pihak pemerintah daerah Kecamatan Tualang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat hingga saat ini, masih banyak PKL yang belum dipindahkan/ditata untuk mewujudkan daerah yang tertib dan tentram. Namun Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Satpol PP sudah baik bermusyawarah dan menghasilkan solusi berupa penataan ketempat baru di Pasar Km.7 Perawang dengan cara musyawarah. Adanya pendekatan yang baik antara pemerintah daerah dan PKL menghasilkan proses ketertiban dan ketentraman yang baik.
2. Faktor hambatan tidak terlaksananya dengan optimal Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2002 adalah faktor internal berupa kurangnya personil dari pihak Satpol PP yang merupakan aparat penegak Peraturan Daerah yang ada di Kecamatan Tualang dengan jumlah penduduk di Kecamatan Tualang paling tinggi Di Kabupaten Siak, Sarana Prasarana pasar yang belum efektif yang merupakan fasilitas baru untuk pemindahan para PKL yang ada di pasar lama, dan armada Satpol PP yang kurang memadai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan tugas dan patrol. Faktor eksternal factor penghambat adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terkhusus PKL dan masyarakat terhadap suatu peraturan atau kebijakan daerah yang berlaku.

3. Menurut tinjauan *fiqih siyasah* dalam upaya penertiban PKL sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan Satpol PP dalam penertiban yang dilakukan dengan mengedepankan sistem musyawarah dari hati-kehati untuk mendapati kata mufakat, dan menghindari kemudharatan yang terjadi seperti bentrokan antara PKL dan pihak terkait.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil pemaparan diatas, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah Kecamatan Tualang agar lebih tegas dan cepat dalam memutuskan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum demi terciptanya wilayah yang tertib dan bersih;
2. Dalam penegakan Peraturan Daerah dikecamatan, ada baiknya personil dari Satpol PP kecamatan lebih diperbanyak untuk mengoptimalkan peran dari Satpol PP.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *“Teori Negara Hukum Modern”*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016)
- Abdul Latif, Ali Hasbi, *“Politik Hukum”*, (Jakarta: SinarGrafika, 2010)
- Ahmad Sukardja, *“Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Bambang Suggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Dayanto, Asma Karim, *“Peraturan Daerah Responsive: Fondasi Teori, Metode, dan Teknik Pembentukan Ed.Revisi, Cet.1”*, (Jatim: SetaraPers, 2019)
- Dzazuli, *“Fiqih Siyasah”*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Eka N.A.M. Sihombing, “Problematisasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.3, 2016
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016)
- Maris G.Rukmana, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di kota Semarang”, *Jurnal Konstituen*, Vol.1 No.2, 2019
- Mariadi, “Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan undang-undang Pemerintahan Aceh”, *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol.3, No.1, 2018
- Muh.Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol.25, No.2, 2017
- Muhammad Iqbal, *“Fiqih Siyasah”*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014)
- Ni matul Huda, *“Hukum Tata Negara Indonesia-Ed.Revisi-6”*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Nyoman Sumaryadi, *“Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia”*, (Bogor: Graha Indonesia, 2013)
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002, Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Okma Sandra, Suryanef,dkk, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dibatang Kapas", *JCE*, Vol.2 No.2, 2019
- Radiana, "Islam sebuah system kehidupan bernegara", *Jurnal Cosmogoy*, Vol.1, No.1, 2015
- Raimundus Bulet Namang, "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.4 No. 2, 2020
- Ratna Artha Windari, "Pengantar Hukum Indonesia-Ed.1,Cet.2", (Depok:Rajawali Pers, 2018 )
- Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Criksetra*, Vol.5, No.9, 2016
- Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum", *Jurnal Syari'ah*, Vol.9, No.1, 2017
- Soekanto Soerjono, "Sosiologi Pengantar", (Jakarta: CV.Rajawali, 2012)
- Teguh Satyo, Ngabiyanto, Dkk, "Peran Satpol Pp Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentabng Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)", *Unnes Political Science Journal*, Vol.1, No.1 2017
- Toto Tohir, "Ulil Amri dan Ketaatan KEPADANYA", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.18 No.3, 2002
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Usman, "Negara dan Fungsinya (Tela'ah atas Pemikiran Politik)", *Jurnal Al-Daulah*, Vol.4 No.1, 2015)
- Vinny Nottrela Ughude, "Tugas Dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam penegakan Hukum", *Lex Et Societatis*, Vol.3, No. 3, 2015



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainuddin Ali, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Zairin Harahap, ”*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Ed.Revisi, Cet.11*”, (Depok: Rajawali pers, 2019)

<https://kbbi.web.id/tenteram>

<https://satpolpp.siakkab.go.id>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **INSTRUMENT WAWANCARA PENELITIAN**

### **1. Satpol PP**

- a. Apa saja tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kecamatan Tualang?
- b. Kapan jam kerja Satpol PP Kecamatan Tualang?
- c. Adakah kerja sama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan ketertiban?
- d. Bagaimana prosedur dalam penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP?
- e. Apa saja hambatan yang dihadapi Satpol PP kecamatan dalam menertibkan PKL?
- f. Apa sanksi dalam pelanggaran perda?
- g. Apakah ada sosialisasi dari pihak Satpol PP Kecamatan Tualang dalam upaya penegakan Perda?

### **2. Pemerintah Kecamatan Tualang**

- a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas penegakan Perda ketertiban umum di Kecamatan Tualang?
- b. Upaya apa saja yang dilakukan pihak Kecamatan Tualang dalam penegakan Perda?
- c. Apa hambatan yang melatar belakangi Perda Nomor 37 tahun 2002 tentang ketertiban umum tidak berjalan ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Korwil Pasar**

- a. Apa fungsi dari Korwil pasar di Kecamatan Tualang?
- b. Apa saja bentuk pengelolaan PKL yang dilakukan oleh Korwil pasar?
- c. Adakah ada kerja sama dengan lembaga lain dalam penataan dan penertiban PKL?
- d. Adakah hambatan yang melatarbelakangi dalam upaya ketertiban umum?



## ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN

Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

### PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda ceklis pada kolom YA jika deskripsi yang diberikan sesuai dengan kondisi anda. Jika tidak, berlikan ceklis pada kolom TIDAK

No	Deskripsi	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda pernah terkena penertiban ?		
2	Apakah anda memiliki tanda daftar usaha?		
3	Apakah permasalahan ekonomi yang melatar belakangi anda berdagang?		
4	Apakah Pemerintah Kecamatan Tualang melakukan pemberdayaan dengan baik?		
5	Apakah pihak korwil pasar sudah menata PKL dengan baik?		
6	Apakah sebelum penertiban ada himbauan dari Pemerintah Kecamatan Tualang (Korwil Pasar/Satpol PP)?		
7	Apakah anda sering melihat Satpol PP di sekitaran pasar?		
8	Apakah Satpol PP dalam Penertiban bertindak kasar?		
9	Apakah Pemerintah Kecamatan Tualang(Korwil pasar/Satpol PP) telah melaksanakan tugasnya dengan baik?		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :

## PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda ceklis pada kolom YA jika deskripsi yang diberikan sesuai dengan kondisi anda. Jika tidak, berikan ceklis pada kolom TIDAK

No	Deskripsi	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda pernah terkena penertiban ?		
2	Apakah anda memiliki tanda daftar usaha?		
3	Apakah permasalahan ekonomi yang melatar belakangi anda berdagang?		
4	Apakah Pemerintah Kecamatan Tualang melakukan pemberdayaan dengan baik?		
5	Apakah pihak korwil pasar sudah menata PKL dengan baik?		
6	Apakah sebelum penertiban ada himbauan dari Pemerintah Kecamatan Tualang (Korwil Pasar/Satpol PP)?		
7	Apakah anda sering melihat Satpol PP di sekitaran pasar?		
8	Apakah Satpol PP dalam Penertiban bertindak kasar?		
9	Apakah Pemerintah Kecamatan Tualang(Korwil pasar/Satpol PP) telah melaksanakan tugasnya dengan baik?		

## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



*Dokumentasi Keadaan Pasar*





*Dokumentasi Wawancara Pihak Kecamatan Tualang*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Dokumentasi Wawancara Satpol PP*



*Dokumentasi pihak Korwil Pasar Kecamatan Tualang*

©



***Dokumentasi Pembagian Angket Pkl Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang***

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Observasi*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



***Dokumentasi Rapat Kordinasi Pkl Pasar Tuah Serumpun Km.4 Perawang Ke  
Pasar Rakyat Km.7 Perawang Barat***



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون  
**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6877/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RATU MIRANDA
NIM	: 11724202935
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang, Kab Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sore Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/36929  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6877/2020 Tanggal 2 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

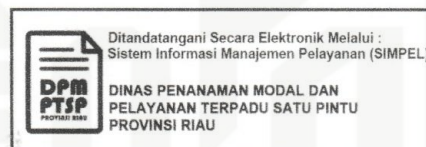
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>RATU MIRANDA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11724202935   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SORE KECAMATAN TUALANG BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN TUALANG KAB. SIAK   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 Desember 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  2. Bupati Siak
  3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
  4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II  
SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 071/Kesbangpol/334  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth:  
**Camat Tualang**

di -  
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36929 Tanggal 3 Desember 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **RATU MIRANDA**  
NIM : 11724202935  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SORE KECAMATAN TUALANG BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 7 Desember 2020

**a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK  
Kasi Kesatuan Bangsa**

**AWALUDDIN, SE**  
NIP. 19771213 201102 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska di Pekanbaru;
- Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Citra Dirangsi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
KECAMATAN TUALANG**

Jln. Raya Perawang KM. 10 telp/Fex. (0761) 320944 Perawang 28772

Perawang, 08 Desember 2020

Nomor : 070/REKOM-RISET/29/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth. :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Negeri Pekanbaru

DI-

TEMPAT

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36929 tanggal 3 Desember 2020 tentang perihal Rekomendasi Riset dengan ini menerangkan bahwa;

Nama	:	<b>RATU MIRANDA</b>
NIM	:	<b>11724202935</b>
Jurusan	:	<b>Hukum Tata Negara</b>
Jenjang	:	<b>S1</b>
Judul Penelitian	:	<b>PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SORE KECAMATAN TUALANG BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.</b>

Bahwa nama yang tersebut diatas akan melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mengikuti ketentuan Protokol Covid 19.

Demikian di sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip

**CAMAT TUALANG,**

ZALIK EFFENDI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19691104 200212 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN TUALANG

Jln. Raya Perawang KM. 10 telp/Fex. (0761) 320944 Perawang 28772

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/PEM-KT//

Camat Tualang Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RATU MIRANDA  
NIM : 11724202935  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Jenjang : S-1  
Universitas : Universitas Islam Negri Pekanbaru

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas Benar telah melaksanakan Penelitian dengan judul "**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SORE KECAMATAN TUALANG BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**" di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tualang, 25 Januari 2021

CAMAT TUALANG

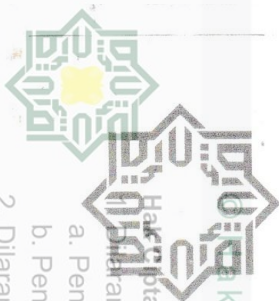


**ZALIK EFFENDI, S.Sos**

Pembina Tk. I

NIP. 196911042002121002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Februari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2154/2021

Sifat : Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Dr. Abu Samah, MH

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : RATU MIRANDA

NIM : 11724202935

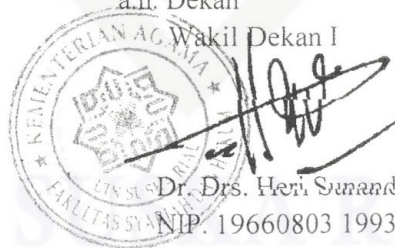
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sore Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandan, M.A.  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2154/2021

Sifat : Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Dr. Abu Samah, MH

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : RATU MIRANDA

NIM : 11724202935

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sore Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandan, M.A.  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sore Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah, ditulis oleh saudara/i:

Nama : Ratu Miranda  
NIM : 11724202935  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Jum'at, 18 September 2020  
Narasumber : Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

**Jalinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 16 Februari 2021  
Narasumber

**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**  
NIP. 197209012005011005

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 37 TAHUN 2002 DALAM UPAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH SERUMPUN BERDASARKAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **RATU MIRANDA**  
NIM : **11724202935**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Rozi Andrini, ME.Sy**

Penguji I  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

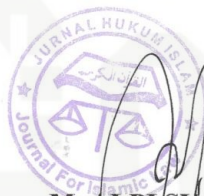
**NAMA : RATU MIRANDA**  
**NIM : 11724202935**  
**JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**JUDUL : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
 NOMOR 37 TAHUN 2002 DALAM UPAYA PENERTIBAN  
 PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH SERUMPUN  
 KECAMATAN TUALANG BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH  
 SIYASAH**

**Pembimbing: Dr. H. Abu Samah, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Penulis bernama **RATU MIRANDA** yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1999 di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Penulis merupakan anak ketiga (3) dari empat (4) bersaudara dari ayah kandung bernama H.Marzuki,SKM,MKL, dan ibu kandung bernama Ida Royani.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: tamat pendidikan Taman Kanak-Kanak Raudhatul Athfal Tualang pada tahun 2005, tamat Madrasah Ibtidaiyah Tualang pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 7 Tualang pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Tualang pada tahun 2017, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada tahun 2021.

Penulis melakukan penelitian pada 2 Desember 2020 - 25 Januari 2021 dengan judul: **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah”**, di bawah bimbingan bapak **Dr.H.Abu Samah,SH,MH.**

Pada tanggal 25 Maret 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal ‘alamin.....